

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2022 DI DESA DELIMA KECAMATAAN TEBING TINGGI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Suhono

suhonodelima@gmail.com

Institute Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta ITB AD

ABSTRAK

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk demokrasi di tingkat lokal yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung. Namun, pasca pemilihan, seringkali terjadi penurunan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah Desa Delima dalam meningkatkan partisipasi masyarakat setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga Desa Delima. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Delima menjalankan beberapa strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, di antaranya melalui komunikasi terbuka, pelibatan warga dalam musyawarah desa, serta pelaksanaan program pembangunan yang bersifat partisipatif. Meskipun terdapat beberapa hambatan seperti perbedaan pandangan pasca pemilihan dan kurangnya sosialisasi program desa, secara umum peran pemerintah desa cukup efektif dalam membangun kembali partisipasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa lainnya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Kepala Desa, Desa Delima.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran aktif pemerintah desa sangat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan warga. Salah satu momentum penting yang dapat memengaruhi hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat adalah pemilihan kepala desa.

Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2022. yang di ikuti oleh empat calon peserta yaitu nomor urut satu Bapak Samino, nomor urut dua Bapak Suhono, nomor urut tiga Ibu Siti Robiah, nomor urut empat Ibu Eka Krisdiantini, dengan jumlah pemilih 1.050 jiwa. Pemilihan kepala desa merupakan proses demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin secara langsung agar mendapatkan pemimpin yang dapat membawa kemajuan dan kemakmuran desa.

Sebelum pemilihan kepala desa, kondisi Desa Delima ditandai dengan adanya perbedaan pandangan politik di antara warga. Rivalitas antarpendingulungan calon kepala desa memunculkan potensi konflik sosial, baik secara terbuka maupun terselubung. Hal ini mengakibatkan munculnya sikap saling curiga, berkurangnya kerjasama dalam kegiatan sosial, serta menurunnya keikutsertaan sebagian warga dalam kegiatan pembangunan desa. Selain itu, beberapa program desa yang melibatkan partisipasi masyarakat cenderung kurang berjalan optimal karena masyarakat lebih fokus pada proses politik.

Tidak sampai itu saja, perbedaan pandangan politik dan konflik sosial di masyarakat setelah pemilihan kepala desa semakin parah dengan adanya kemenangan salah satu calon, timbul masalah yang baru yaitu terjadinya penurunan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa akibat polarisasi politik, adanya kekecewaan atas hasil pemilihan karena calon yang di dukungnya kalah, adanya intervensi dan ejekan dari simpatisan atau timsukses calon yang menang sehingga mengakibatkan masyarakat terkelompok-kelompok dan timbul rasa acuh atau tidak peduli terhadap sosial bermasyarakat dan kemudian terjadi kurangnya komunikasi masyarakat dengan kepala desa yang baru mengakibatkan terjadinya jarak di masyarakat,

Kondisi ini berpengaruh terhadap keberlangsungan masadepan pemerintahan desa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam mengembalikan kepercayaan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat, perludanya strategi dan pendekatan secara khusus untuk menyatukan masyarakat, hal ini menjadi tugas kepala desa terpilih.

Dua tahun Setelah pemilihan kepala desa tahun 2022, kondisi masyarakat secara perlahan mulai membaik. Pemerintah Desa Delima yang baru terpilih berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui kebijakan yang lebih terbuka, transparan, dan partisipatif. Kegiatan musyawarah desa kembali digalakkan, gotong royong masyarakat mulai aktif, serta lembaga-lembaga desa seperti Karang Taruna, PKK, dan kelompok tani kembali diberdayakan. Meski masih terdapat sisa konflik sosial pasca pemilihan, upaya pemerintah desa untuk merangkul semua pihak mulai menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pasca pemilihan tersebut, pemerintah desa memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial serta meningkatkan kembali semangat partisipatif warga. Upaya-upaya seperti penyuluhan, musyawarah desa, serta pelibatan masyarakat dalam program pembangunan menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah desa mampu menjalankan fungsinya secara efektif.

Dengan demikian, penelitian mengenai “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 di Desa Delima” menjadi penting untuk mengungkap bagaimana pemerintah desa mengelola kondisi sosial pasca pemilihan serta strategi yang ditempuh dalam membangun kembali partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2022, khususnya di Desa Delima. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta masukan bagi penguatan pemerintahan desa yang partisipatif dan inklusif di masa depan.

METODOLOGI

Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pasca Pilkades tahun 2022 di Desa Delima.

Menurut Lexy J. Moleong (2017), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui deskripsi yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi permukaan, tetapi juga dari makna yang tersembunyi di balik tindakan, pengalaman, dan interaksi sosial subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama, dan bersifat fleksibel dalam pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Lebih lanjut, Moleong menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif digunakan ketika

peneliti ingin menggali makna, konsep, atau nilai dari suatu fenomena sosial, bukan sekadar mengukur frekuensi atau hubungan antar-variabel seperti pada pendekatan kuantitatif. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan dianalisis secara induktif, dengan fokus pada proses dan pemahaman kontekstual terhadap situasi yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Delima memiliki peran yang signifikan dalam mendorong partisipasi masyarakat setelah pemilihan kepala desa tahun 2022. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada kegiatan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup proses musyawarah, pengambilan keputusan, dan pengawasan terhadap program-program desa.

Pemerintah desa melakukan transparansi informasi, yaitu dengan menyampaikan program kerja, perencanaan anggaran, dan hasil kegiatan melalui media pengumuman dan rapat terbuka. Hal ini sesuai dengan teori partisipasi menurut Kosasih Djahiri (1985) yang menyatakan bahwa partisipasi tumbuh jika masyarakat merasa dilibatkan dan mengetahui arah pembangunan.

Selain itu, pendekatan yang dilakukan oleh kepala desa dan aparatnya bersifat komunikatif dan terbuka. Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui forum musyawarah desa. Ini sejalan dengan pendapat Miftah Thoha (2003) yang menyebut bahwa pemimpin lokal yang bersifat partisipatif akan mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas.

Namun, partisipasi masyarakat tidak terlepas dari kendala. Konflik sosial pasca pilkades, sisa rivalitas politik, dan rendahnya kesadaran sebagian warga menjadi tantangan yang cukup besar. Pemerintah desa menanggapi kondisi ini dengan cara pendekatan sosial, mediasi informal, dan mengikutsertakan tokoh masyarakat dalam forum penyelesaian konflik.

Upaya lain yang dilakukan adalah memberdayakan kelompok masyarakat melalui pelatihan keterampilan, dukungan modal usaha kecil, dan kerja bakti desa. Ini mencerminkan prinsip pemberdayaan seperti yang dikemukakan oleh Chambers (1995) bahwa partisipasi dapat ditumbuhkan melalui penguatan kapasitas masyarakat.

Secara keseluruhan, pemerintah Desa Delima telah menunjukkan peran aktif dan adaptif dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat setelah kontestasi politik desa. Peningkatan partisipasi yang terjadi menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Perubahan Pola Partisipasi Masyarakat Pasca Pilkades 2022

Partisipasi masyarakat Desa Delima mengalami perubahan setelah Pilkades tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, diketahui bahwa pasca Pilkades, masyarakat lebih cenderung acuh dan pasif dalam mengikuti kegiatan desa. Namun seiring berjalanya waktu dan adanya pendekata yang dilakukan oleh kepemimpinan baru, dengan bertahap partisipasi mengalami peningkatan, terutama dalam kegiatan musyawarah desa dan kerja bakti lingkungan.

“Satu tahun Setelah kontestasi politik pilkades, warga jarang datang musyawarah dan bersosial tapi dengan berjalanya waktu sekarang banyak yang aktif karena dengan pendekatan yang dilakukan oleh kades terpilih sehingga masyarakat merasa pendapatnya dihargai,” ujar Bapak Hasan basri, tokoh masyarakat Rt 01 (Wawancara, 10 juni 2025).

Perubahan ini dapat dikaitkan dengan teori partisipasi politik lokal, di mana kepercayaan terhadap pemimpin lokal menjadi faktor penting dalam membentuk keterlibatan warga (Putnam, 1993).

Pendekatan Komunikatif Pemerintah Desa

Pendekatan komunikatif merupakan salah satu strategi penting yang digunakan oleh pemerintah Desa Delima untuk membangun kembali kepercayaan dan keterlibatan masyarakat pasca pemilihan kepala desa tahun 2022. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat rekonsiliasi sosial dan pemersatu masyarakat yang sempat terpecah karena perbedaan pilihan politik. ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah desa ialah:

1) Transparansi Informasi

Pemerintah desa secara aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi:

- a. Papan pengumuman di balai desa dan Wabsite desa.
- b. Pertemuan rutin seperti rapat RT/RW dan musyawarah desa.
- c. Grup media sosial (WhatsApp/Facebook) untuk penyebaran informasi cepat.

Transparansi ini menciptakan rasa keterbukaan dan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan desa karena mereka merasa dilibatkan.

2) Dialog Partisipatif

Kepala desa dan perangkatnya mengedepankan forum-forum dialog terbuka dengan warga. Hal ini dilakukan melalui:

- a. Diskusi mingguan antara perangkat desa dan tokoh masyarakat.
- b. Konsultasi publik sebelum menyusun program kerja.
- c. Kegiatan informal seperti pengajian kliwonan dan ngopi bareng warga untuk menampung aspirasi secara santai.

Pendekatan ini memperkuat ikatan sosial dan mengurangi potensi konflik pasca Pilkades karena semua kelompok merasa memiliki ruang untuk menyuarakan pendapat.

3) Responsif terhadap Keluhan dan Aspirasi

Pemerintah desa menyediakan jalur aduan langsung, baik secara lisan maupun tertulis, dan menindaklanjuti keluhan masyarakat secara cepat. Conthnya: Saat ini, kalau ada masalah kami sampaikan langsung ke Kantor desa kemudian cepat respon dan ditanggapi. Itu bikin kami merasa dihargai, (Wawancara dengan warga, 10 juni 2025).

Sikap responsif ini membangun kredibilitas dan memperkuat hubungan horizontal antara pemerintah dan masyarakat.

4) Komunikasi Inklusif dan Non-Diskriminatif

Pemerintah desa secara sadar melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok minoritas, perempuan, dan pemuda, dalam kegiatan desa tanpa membedakan latar belakang politik mereka sebelumnya. Hal ini penting dalam proses pemulihan pasca konflik politik.

“Walaupun dulu beda pilihan, sekarang semua warga diajak kerja sama demi kemajuan desa,” (Tokoh Karang Taruna, Desa Delima).

Teori Pendukung ini dapat menjadi rujukan yaitu Pendekatan ini sesuai dengan teori Komunikasi Partisipatif (Participatory Communication) menurut Servaes (1999), yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah, horizontal, dan saling memberdayakan dalam proses pembangunan masyarakat.

Kesimpulannya ialah Pendekatan komunikatif menjadi landasan penting dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa Delima telah berhasil mengurangi sekat-sekat sosial dan politik melalui komunikasi yang transparan, terbuka, dan inklusif, sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa meningkat secara signifikan.

Kepala desa terpilih menjalankan pendekatan dengan lebih terbuka dan komunikatif, mengadakan pertemuan rutin bersama warga. Komunikasi dua arah menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, sehingga warga merasa lebih dihargai

“Pak Kades sekarang sering kumpulkan warga dan aktif dalam kegiatan warga, sehingga kami dapat menyampaikan aspirasi langsung, itu membuat kami semangat ikut kegiatan desa,” (Ibu Sumiati, anggota PKK, 12 juni 2025).

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance, yaitu adanya keterbukaan informasi dan partisipasi publik (UNDP, 1997).

Analisis Konflik Pasca Pilkades

Konflik yang terjadi setelah Pilkades 2022 umumnya bersifat horizontal, yaitu antara pendukung calon kepala desa. Konflik ini memengaruhi partisipasi karena munculnya rasa tidak percaya antar kelompok masyarakat. Pemerintah desa kemudian membentuk forum silaturahmi antar tokoh masyarakat sebagai bagian dari strategi rekonsiliasi. Analisis konflik pasca pilkades 2022 Desa Delima ialah:

1. Bentuk Konflik yang Terjadi

Setelah Pilkades tahun 2022 di Desa Delima, beberapa bentuk konflik sosial muncul di tengah masyarakat, antara lain:

- a. Konflik horizontal antarpendingukung calon, yang dipicu oleh perbedaan pilihan politik dan rasa tidak puas terhadap hasil pemilihan.
- b. Ketegangan sosial di lingkungan RT, seperti boikot kegiatan desa oleh kelompok yang kalah.
- c. Isu manipulasi dan dugaan ketidakadilan, meskipun tidak terbukti secara hukum, namun memunculkan ketidakpercayaan terhadap panitia pemilihan dan pemerintah desa.

2. Faktor Penyebab Konflik

Beberapa faktor utama pemicu konflik yang terjadi di masyarakat pasca pilkades antara lain:

- a. Fanatisme berlebihan terhadap calon tertentu yang menciptakan polarisasi sosial.
- b. Kurangnya transparansi dan nertalitas dalam proses pemilihan, terutama dalam hal distribusi logistic, penghitungan suara, atau kampanye.
- c. Ketidak matangan politik masyarakat desa, yang belum mampu menerima perbedaan secara dewasa.
- d. Kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa secara cepat dan adil di tingkat desa.

3. Dampak Konflik

Konflik pasca Pilkades menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat Desa di antaranya:

- a. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa seperti gotong royong, musyawarah, program pemberdayaan dan pembangunan.
- b. Retaknya hubungan sosial antarwarga, termasuk hubungan antar-RT yang sebelumnya harmonis.
- c. Hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan desa, karena sebagian warga enggan terlibat akibat konflik kepentingan politik.

4. Upaya Penyelesaian.

Pemerintah desa dan tokoh masyarakat mengambil beberapa langkah untuk meredakan konflik:

- a. Dialog antarpendingukung calon yang dimediasi oleh tokoh adat dan tokoh agama.
- b. Penyuluhan dan pendekatan persuasif kepada kelompok yang kecewa atas hasil Pilkades.
- c. Mendorong musyawarah desa sebagai forum rekonsiliasi, untuk membangun kembali kepercayaan dan kebersamaan.

Konflik sosial tidak selalu bersifat destruktif; konflik dapat menjadi sarana menuju perubahan sosial jika dikelola dengan benar. Dalam konteks Desa Delima, konflik pasca Pilkades dapat menjadi pembelajaran demokrasi lokal, asalkan pemerintah desa mampu

menunjukkan sikap netral, komunikatif, dan inklusif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan optimal jika dibangun di atas fondasi sosial yang kondusif. Oleh karena itu, penanganan konflik pasca Pilkades menjadi kunci utama dalam meningkatkan kembali keterlibatan warga dalam proses pembangunan desa.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berbeda dengan studi oleh Rudianto (2021) yang meneliti rendahnya partisipasi masyarakat akibat dominasi elite desa pasca Pilkades di Desa Margodadi, Lampung. Di Desa Delima, justru terjadi peningkatan partisipasi karena kepemimpinan yang inklusif, merangkul semua golongan dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan pasca Pilkades sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat secara langsung.

Evaluasi Dampak Program Pemerintah Desa

1. Pengertian Evaluasi Dampak

Evaluasi dampak adalah proses menilai sejauh mana suatu program atau kebijakan memberikan perubahan yang signifikan terhadap masyarakat. Dampak yang dimaksud mencakup perubahan sikap, perilaku, kondisi sosial-ekonomi dan tingkat partisipasi masyarakat yang dapat dihubungkan langsung atau tidak langsung dengan program pemerintah desa.

Menurut Rossi, Lipsey, dan Freeman (2004), evaluasi dampak dilakukan untuk menilai apakah tujuan jangka panjang dari program tercapai, dan apakah ada efek positif atau negatif terhadap kelompok sasaran.

Tabel 4: Evaluasi dampak program yang di lakukan pemerintah desa pasca pilkades

Program	Dampak Positif	Tantangan
Musyawarah Desa	Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan	Belum semua warga aktif hadir
Pelatihan UMKM	Meningkatkan pendapatan keluarga	Terbatasnya dana dan fasilitas pelatihan
Gotong Royong Bersama	Meningkatkan kebersamaan sosial	Sebagian warga kurang antusias

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti(2025)

Dari evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwa program-program desa berdampak positif namun tetap memerlukan penyempurnaan dalam hal jangkauan dan efektivitas.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran strategis dalam membangun partisipasi masyarakat. Ini sejalan dengan konsep partisipatif dalam pembangunan menurut Moleong (2017), bahwa pelibatan warga secara aktif menciptakan kepercayaan dan keberlanjutan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat pasca pemilihan juga menunjukkan bahwa komunikasi terbuka yang tidak membatasi golongan dari pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap perbaikan hubungan sosial dan politik di tingkat desa.

2. Tujuan Evaluasi Dampak di Pemerintahan Desa

Dalam konteks pemerintah desa, tujuan dari evaluasi dampak adalah untuk:

- Mengetahui keberhasilan program desa dalam membangun kembali kepercayaan dan partisipasi warga.
- Mengidentifikasi apakah terjadi peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah, pembangunan, dan pelayanan.
- Mengukur perubahan sosial pasca konflik Pilkades (misalnya: kerukunan, kerja sama, komunikasi lintas kelompok).
- Memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan atau strategi komunikasi pemerintahan

desa.

3. Indikator Evaluasi Dampak

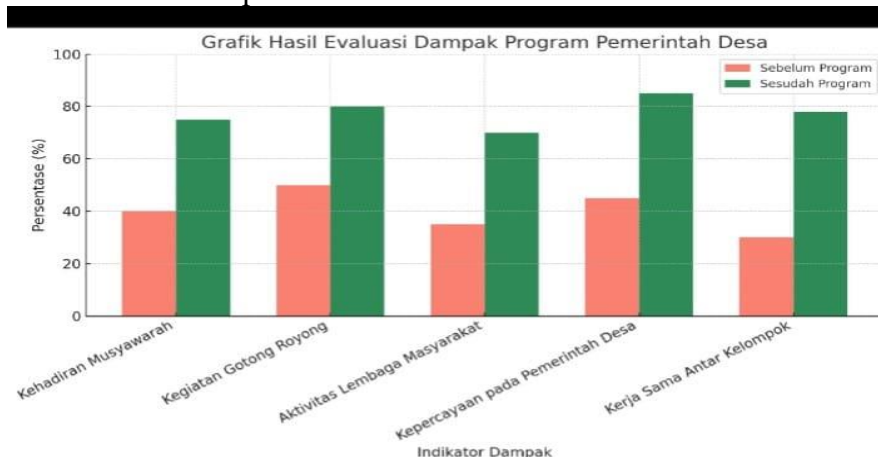
Berikut beberapa indikator evaluasi yang relevan:

Aspek	Indikator Dampak
Partisipasi Sosial	- Peningkatan jumlah warga hadir di musyawarah. - Gotong royong dan kegiatan sosial meningkat
Kepercayaan terhadap Pemerintah Desa	- Masyarakat lebih terbuka menyampaikan aspirasi. - Menurunnya sikap apatis atau boikot terhadap program desa
Kelembagaan Masyarakat	Aktifnya kelompok seperti PKK, Karang Taruna, kelompok tani setelah vakum pasca Pilkades
Hubungan Sosial	- Menurunnya konflik antar pendukung calon - Munculnya kerja sama lintas kelompok
Peningkatan Kapasitas Ekonomi/Sosial	Warga mengikuti pelatihan, usaha kecil, dan program pemberdayaan ekonomi

4. Teknik Pengumpulan Data untuk Evaluasi

Untuk mengevaluasi dampak ini, pemerintah desa atau peneliti dapat menggunakan:

- Wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat dan warga
 - Kuesioner atau angket partisipatif
 - Observasi langsung kegiatan desa
 - Dokumentasi program desa (laporan kegiatan, berita acara, foto-foto)
5. Grafik hasil evaluasi dampak



Berikut adalah grafik hasil evaluasi dampak program pemerintah desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Grafik ini menunjukkan peningkatan signifikan pada semua indikator setelah pelaksanaan program, seperti kehadiran musyawarah, gotong royong, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 di Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Pemerintah Desa Delima memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pasca pemilihan kepala desa. Hal ini diwujudkan melalui transparansi informasi terkait program desa dan pelibatan masyarakat dalam

musyawarah desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, serta upaya penyelesaian konflik pasca pilkades.

- b. Partisipasi masyarakat di Desa Delima menunjukkan peningkatan setelah pemerintah desa melaksanakan program-program pemberdayaan. Masyarakat tidak hanya terlibat dalam kegiatan musyawarah, tetapi juga dalam gotong royong, pelatihan ekonomi, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
- c. Faktor pendukung peningkatan partisipasi masyarakat antara lain keterbukaan pemerintah desa, dukungan tokoh masyarakat, dan adanya program pemberdayaan yang menyentuh kebutuhan warga. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, perbedaan latar belakang pendidikan, serta adanya sisa konflik politik pasca pemilihan kepala desa.
- d. Upaya pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian konflik terbukti menjadi kunci keberhasilan pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta terciptanya pembangunan yang lebih partisipatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Delima sangat dipengaruhi oleh peran aktif pemerintah desa, khususnya dalam menciptakan keterbukaan, pemberdayaan, dan penyelesaian konflik pasca pilkades. Keterlibatan masyarakat pasca pemilihan juga menunjukkan bahwa komunikasi terbuka yang tidak membatasi golongan dari pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap perbaikan hubungan sosial dan politik di tingkat desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa Delima

Diharapkan terus meningkatkan transparansi informasi melalui berbagai media, memperkuat komunikasi publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta memperluas program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan warga dan memperkuat pelibatan warga dalam setiap proses pembangunan desa, Pemerintah desa juga perlu menyediakan ruang dialog yang terbuka dan inklusif agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara efektif.

2. Untuk Masyarakat Desa Delima

Diharapkan lebih aktif dalam berpartisipasi, baik dalam musyawarah desa, kegiatan gotong royong, maupun program-program pembangunan lainnya. Masyarakat juga perlu membangun kesadaran bahwa partisipasi aktif merupakan bagian penting dalam menentukan arah pembangunan desa.

3. Untuk Tokoh Masyarakat dan Lembaga Desa

Perlu memperkuat peran sebagai mediator dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa, terutama dalam menyelesaikan konflik yang mungkin muncul pasca pemilihan, dan Badan Permusyawaratan Desa dapat berperan sebagai representasi masyarakat perlu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal serta menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa agar partisipasi warga dapat terakomodasi secara adil dan merata.

4. Untuk Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan membandingkan beberapa desa lain, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji aspek lain seperti pengaruh tingkat pendidikan, ekonomi, dan budaya terhadap partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, A. (2018). Konflik sosial pasca pemilihan kepala desa: Studi kasus di Desa Sukatani Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut (Skripsi tidak diterbitkan). UINSunanGunungDjatiBandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/18456>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bintarto. (1983). Geografi Sosial. Jakarta: LP3ES.
- Chambers, R. (1995). Rural Development: Putting the Last First. London: Longman.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation. Ithaca: Cornell University.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation. Ithaca: Cornell University.
- Cornwall, A. (2008). Judul: Unpacking ‘Participation’: Models, Meanings and Practices Sumber: *Community Development Journal*, 43(3), 269–283.
- Davis, K. (1981). Human Relations at Work. New York: McGraw-Hill.
- Djahiri, Kosasih. (1985). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Bandung: Alumni.
- Durkheim, E. (1982). The Rules of Sociological Method. New York: Free Press.
- ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id
- Kartasasmita, G. (1996). Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES Indo.
- Kasmat, Y., & Nadir. (2025). Conflict Dynamics and Resolution in Chief of Village Elections: A Case Study of Maradekaya Village. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 12(1), 45–58.
- Koentjaraningrat. (1990). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). California: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. (1984). Pengantar Ekonomi Pertanian. Yogyakarta: BPFE.
- Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). Evaluation: A Systematic Approach (7th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Rudianto, A. (2021). Partisipasi Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa di Desa Margodadi, Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal*, 10(2), 45–59.
- Sari, R. P., & Hidayat, R. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pasca Pemilihan Kepala Desa di Jawa Barat Sumber: *Jurnal Administrasi Publik*, 7(3), 112–120.
- Servaes, J. (1999). Communication for Development: One World, Multiple Cultures. Cresskill, NJ: Hampton Press.
- Soemardjan, S. (1990). Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: UI Press.
- Soetodjo. (2003). Hukum Tata Pemerintahan Desa. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soetomo. (2011). Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. (2011). Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, S. (2009). Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sutarjo, M. (2003). Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Era Otonomi Daerah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutarno. (2006). Administrasi Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thoha, M. (2003). Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Thoha, Miftah. (2003). Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah .
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- UNDP (United Nations Development Programme). (1997). Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document. New York: UNDP.
- Weber, M. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press.
- Wignjosoebroto, S. (2002). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Elsam.